

## ABSTRAK

### **Deskripsi tentang putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media sosial**

Oleh

Surya Perdana Hutagaol

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana bentuk kesalahan terdakwa tindak pidana pornografi melalui media sosial sehingga dijatuhkan putusan pemidanaan oleh Hakim, 2. Mengapa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana pornografi melalui media sosial sangat rendah.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bentuk kesalahan dari terdakwa tindak pidana pornografi melalui media sosial sehingga dijatuhkan putusan pemidanaan oleh Hakim, 2. Untuk mengetahui lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana pornografi melalui media sosial sangat rendah.

Jenis metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif dan sifat penelitian adalah bersifat diskriptif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bentuk kesalahan dan lamanya pemidanaan dalam tindak pidana pornografi melalui media sosial. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan adalah maka bentuk kesalahan dari terdakwa tindak pidana pornografi melalui media sosial adalah terdakwa membuat pornografi (adegan persetubuhan) yang secara eksplisit memuat ketelanjangan dan kemudian menyebarkan dengan cara mengirimkan melalui bluetooth kepada orang lain, terdakwa melakukan tindak pidana menyebarkan pornografi dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (memposting foto-foto ketelanjangan di media sosial Instagram dan BBM), terdakwa menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (menyebarkan foto ketelanjangan melalui pesan Whatsapp dan Instagram), terdakwa membuat pornografi dan menyebarkan pornografi melalui pesan media sosial Facebook, terdakwa menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin melalui pesan media sosial Facebook. Lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana pornografi melalui media sosial sangat rendah dikarenakan adanya hal-hal yang meringankan terdakwa lebih banyak daripada hal-hal yang memberatkan terdakwa, telah ada upaya damai antara terdakwa dengan korban, sistem pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, independensi Hakim.

Saran yang penulis berikan adalah kepada pemerintah melalui Kominfo lebih meningkatkan kembali melakukan pemblokiran konten-konten pornografi di internet, mulai dari media sosial aplikasi-aplikasi yang kebanyakan memuat konten pornografi Facebook, Twitter, Michat, dan aplikasi lainnya, adapun situs-situs berbasis illegal sehingga tidak ada lagi kalangan masyarakat terutama anak-anak dibawah umur yang menonton. Kepada pihak Kepolisian seharusnya perlu meningkatkan pemahaman dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah tindak pidana penyebaran konten pornografi.

***Kata Kunci : Pornografi, Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemidanaan.***

## ABSTRACT

### **Description of the Judge's decision against the perpetrators of criminal acts of pornography through social media**

By

Surya Perdana Hutagaol

The problems raised in this research are: 1. How is the form of guilt of the defendant of the crime of pornography through social media so that the verdict of punishment is imposed by the Judge, 2. Why the length of punishment imposed on the defendant of the crime of pornography through social media is very low.

The objectives of this research are: 1. To find out the form of guilt of the defendant of the crime of pornography through social media so that the verdict of punishment is imposed by the Judge, 2. To find out the length of punishment imposed on the defendant of the crime of pornography through social media is very low.

The type of research method that the author uses is normative research and the nature of the research is descriptive. The independent variables in this study are the form of error and the length of punishment in the criminal offense of pornography through social media. The dependent variable in this study is the Judge's decision against the perpetrators of criminal acts of pornography through social media.

Based on the results of the research conducted by the author, the form of guilt of the defendant in the crime of pornography through social media is that the defendant made pornography (intercourse scene) which explicitly contains nudity and then disseminates it by sending it via bluetooth to other people, the defendant committed the crime of disseminating pornography and the crime of information and electronic transactions (posting photos of nudity on social media Instagram and BBM), the defendant disseminated pornography that explicitly contained nudity and the crime of information and electronic transactions (disseminating photos of nudity through Whatsapp and Instagram messages), the defendant made pornography and disseminated pornography through Facebook social media messages, the defendant disseminated pornography that explicitly contained genitals through Facebook social media messages. The length of the punishment imposed on the defendant for the crime of pornography through social media was very low because there were more mitigating circumstances than aggravating circumstances for the defendant, there had been an amicable settlement between the defendant and the victim, the punishment system adopted by the Republic of Indonesia is not to deprive human dignity as a creation of God Almighty, the independence of the judge.

The suggestion that the author gives is to the government through Kominfo to increase the blocking of pornographic content on the internet, starting from social media applications that mostly contain pornographic content Facebook, Twitter, Michat, and other applications, as well as illegal-based sites so that there are no more people, especially minors who watch. The police should need to increase understanding in conducting socialization to the community to prevent criminal acts of spreading pornographic content.

**Keywords: Pornography, Information and Electronic Transactions, Criminalization.**